

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



Oleh :

**M. HIDAYAT PANUNTUN MUSLIM
NIM. 14042061**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang**

Nama : **M Hidayat Panuntun Muslim**

NIM/TM : **14042061/2014**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

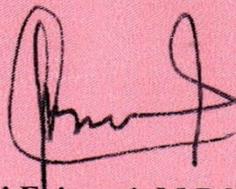
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial**

Padang, 13 N0vember 2018

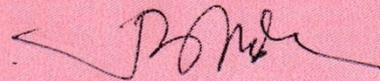
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP. 19640208 199003 2 001

Pembimbing II



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 13 November 2018 Pukul 14.00-15.00 WIB

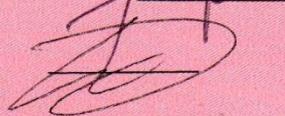
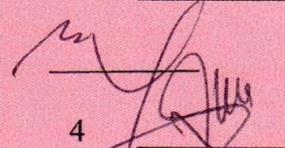
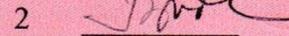
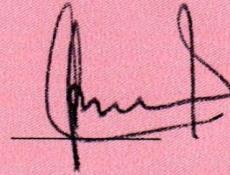
Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Nama : M Hidayat Panuntun Muslim
NIM/TM : 14042061/2014
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 November 2018

Tim Penguji

Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D 1
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si 2
Anggota : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D 3
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D 4
Anggota : Zikri Alhadi, S.IP. MA 5



Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd

NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Hidayat Panuntun Muslim

NIM/TM : 14042061/2014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebgaimana mestinya.

Padang, 13 November 2018
Yang Membuat Pernyataan,



M. Hidayat Panuntun Muslim
NIM. 14042026

ABSTRAK

Nira Elsa Ramadhani 14042009/2014 :Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang penyelesaiannya dari tahun ke tahun selalu berada pada prioritas utama bangsa. Banyak program pemerintah yang dikururkan demi mengurangi angka kemiskinan ditengah masyarakat. Beberapa program seperti Beras Miskin (Raskin) serta Beras Sejahtera (Rastra) yang dijalankan pada tahun 2014. Namun, pada kenyataan program tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dikarenakan akses dan fasilitas yang tidak memadai.

Pada tahun 2017 Beras Sejahtera (Rastra) tidak lagi dijalankan sepenuhnya di Indonesia, hanya dijalankan pada beberapa kabupaten/ kota di Indonesia. Karena program tersebut sudah digantikan dengan program baru yakni, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diujicobakan ke 44 Kabupaten/kota pada tahun 2017 yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai.

Jenis dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu berupa proses wawancara secara langsung dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari literature instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Dan teknik pengumpulan data dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari program bpnt belum berjalan dengan baik dikarenakan ada kendala pada pemerintahan tingkat bawah yang belum mengoptimalkan implementasi bpnt dengan lancer. Banyak masyarakat yang tidak terdata untuk menerima bantuan tersebut.

Keywoerd : Implementasi, Kebijakan Publik, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada (1) Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.d selaku pembimbing 1 (2) Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku pembimbing 2, (3) Drs. M. Fachi Adnan, M.Si, Ph.D selaku penguji 1, (4) Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku penguji 2, (5) ZikriAlhadi, S.IP. MA selaku penguji 3, (6) orang tua, (5) teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang Angkatan 2014 khususnya Nira, Mela, Dini, Feby, Rara, Dila, Dio, Erwin (8) yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, Jheryan Thommas.

Penulis berusaha dengan sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan jika di dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 13 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	13
1. Kebijakan Publik.....	13
a. Konsep Kebijakan Publik	13
b. Konsep Implementasi Kebijakan	18
c. Model Implementasi Kebijakan Publik	22
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai	33
3. Kendala dan Solusi	36
a. Konsep Kendala.....	36
b. Konsep Solusi	38
B. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	46
1. Gambaran Umum Kecamatan Kuranji Kota Padang	46
B. Temuan Khusus.....	55
1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kuranji Kota Padang	55
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang	68
3. Solusi dalam Megatasi Kendala Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang	71
C. Pembahasan.....	74
4. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kuranji Kota Padang	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	89
----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Impementasi Edward III	31
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Padang	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Masyarakat Penerima Bantuan BPNT Kelurahan Kuranji Kecamatan.Kuranji	6
Tabel 2.1 Teknik Analisis Implementasi.....	31
Tabel 3.1 Informan Penelitian	41
Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Padang	48
Tabel 4.2 Luas Daerah Menurut Kelurahan	49
Tabel 4.3 Luas Lahan Kering menurut Jenis Penggunaannya	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	89
Lampiran 2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.....	93
Lampiran 3. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	94
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Padang	95
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kec. Kuranji Kota Padang	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Salah satu bidang yang sedang dalam proses pembangunan yaitu bidang ekonomi. Diantaranya terjadi karena ada peningkatan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%) dari 255.461.686 jiwa penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96%) dari 245.862.034 jiwa, hal ini menandakan bertambahnya 0,86 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang penyelesaiannya dari tahun ke tahun selalu berada pada prioritas utama bangsa. Banyak program pemerintah yang dikururkan demi mengurangi angka kemiskinan ditengah masyarakat. Beberapa program seperti Beras Miskin (Raskin) serta Beras Sejahtera (Rastra) yang dijalankan pada tahun 2014. Namun, pada kenyataan program tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dikarenakan akses dan fasilitas yang tidak memadai.

Pada tahun 2017 Beras Sejahtera (Rastra) tidak lagi dijalankan sepenuhnya di Indonesia, hanya dijalankan pada beberapa kabupaten/ kota di Indonesia. Karena program tersebut sudah digantikan dengan program baru yakni, Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) yang diujicobakan ke 44 Kabupaten/kota pada tahun 2017 yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (Menko PMK) Puan Maharani menjelaskan :

“Berdasarkan Laporan Realisasi Penyaluran BPNT yang diterbitkan oleh Himbara, pada tahun 2017 sebanyak 1.163.891 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah merasakan manfaat program ini. Bantuan yang diberikan per KPM sebanyak Rp 110.000. Dana yang telah disalurkan sebanyak 1,53 Triliun Rupiah. Untuk Pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2017 berdasarkan Laporan Realisasi Penyaluran Rastra yang diterbitkan Perum Bulog sebanyak 2 juta ton lebih beras telah disalurkan kepada 14 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat. Dari Harga Pembelian Beras Bulog sebesar Rp9.220, KPM cukup menebus dengan harga R 1.600. Anggaran rastra sendiri pada tahun 2017 sebesar Rp19,5 Triliun” (www.MenkoPMK.com 5 februari 2018)

Menurut Pedoman Umum BPNT 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk hanya membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut *E-Warong* yang bekerjasama dengan bank penyalur.

KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT yang selanjutnya disebut KPM BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Daftar KPM memuat informasi sebagai berikut; nama pasangan kepala keluarga; nama kepala keluarga; nama anggota keluarga lainnya; alamat tinggal keluarga; nomor induk kependudukan; kode

unik dalam Data Terpadu-Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM); nama gadis ibu kandung; nomor peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pedoman umum BPNT dikatakan bahwa Elektornik warung gotong royong yang selanjutnya disebut *E-warong* adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu usaha mikro dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran yang lainnya. Kemudian yang dikatakan Bank Penyalur BPNT adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial. Di kota Padang yang menjadi Bank Penyalaur sebagai mitra kerja adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dalam melakukan transaksi di *E-warong* masyarakat menggunakan kartu Kombo. Kartu Kombo merupakan alat transaksi yang digunakan oleh masyarakat melakukan transaksi untuk mendapatkan bantuan di *E-warong*. Dalam Pedoman Umum BPNT yang dimaksud dengan kartu Kombo adalah instrument yang terdiri dari kartu Kombo, Buku Tabungan, PIN (*Personal Identification Number*), dan informasi program yang diserahkan KPM dalam registrasi KPM. Dijelaskan pula bahwa kartu Kombo digunakan sebagai identitas KPM dan berfungsi sebagai uang elektronik dan tabungan, serta kartu Kombo tidak bisa dicairkan atau diuangkan.

Tujuan dari program BPNT dalam pedoman umum adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM; memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)(pedoman umum BPNT 2018).

Kota Padang merupakan salah satu kota dari 44 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menjalankan program dari bulan Januari tahun 2017. Namun pada kenyataannya, di Kota Padang sendiri Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih belum dikenal masyarakat sepenuhnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu fungsi dari BPNT. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan, dan Pendamping BPNT ditengah masyarakat. Oleh, karena itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara mendapatkan BPNT dan menjadi Keluarga Penerimaannya.

Pedoman Umum BPNT menjelaskan bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan adalah pelaksana Program Bansos Kecamatan , yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan dan evaluasi Program BPNT di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Sedangkan Pendamping BNPT mempunyai tugas melengkapi data KPM untuk pembukaan rekening; membuat

jadwal distribusi Kartu Kombo; melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Kartu Kombo dan transaksi non tunai kepada KPM; mendampingi KPM selama proses registrasi, aktivasi rekening dan pencairan dana Program BPNT; melakukan pemantauan pelaksanaan Program BPNT dengan berkordinasi dengan Tim Kordinasi Bansos Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Penrangkat Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan Program BPNT.

Pembagian BPNT di Kota Padang dianggap tidak merata, karena banyaknya warga yang kurang mampu tidak mendapatkan BPNT. Hal ini disampaikan oleh warga Kel. Kuranji Kec. Kuranji Nurbaiti mengatakan :

“Bantuan ini belum merata di dapatkan oleh masyarakat, terkhusus saya pribadi. Padahal pada program Beras Miskin (Raskin) saya selalu dapat Kupon beras untuk ditukarkan ke Kantor Lurah. Tapi, setelah ada program ini saya tidak mendapatkan bantuan beras lagi.”(wawancara 28 Januari 2018)

Sejalan dengan pengamatan penulis selama mengikuti Program Magang Ilmu Administrasi Negara periode Juli- September 2017 tepatnya pada bulan Agustus bahwa pendataan tahap awal tersebut diambil dari data penerima Raskin yang kemudian diajukan ke dinas terkait sebagai pelaksana bantuan.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa tidak adanya pemerataan pendataan serta mekanisme pendataan yang tidak relevan dengan data lapangan. Bisa dilihat bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendataan program tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan serta kebingungan di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengetahui Beras miskin atau Beras Sejahtera di peruntukkan untuk masyarakat kurang mampu, tetapi kenyataanya tidak hanya masyarakat kurang yang mendapatkan bantuan tersebut. namun juga

masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan bantuan tersebut. Berikut data masyarakat penerima bantuan yang berasal dari masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.

Tabel 1.1 Daftar Masyarakat Penerima Bantuan BPNT Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji

No		Jumlah
1	Masyarakat Kurang Mampu (yang berhak menerima)	1.198 Kepala Keluarga (KK)
2	Masyarakat Kurang Mampu Yang Menerima Bantuan	451 Kepala Keluarga (KK)

Sumber : data penerima bantuan dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kelurahan Kuranji

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat kurang mampu sebanyak 1.198 KK, sedangkan masyarakat yang menerima bantuan sebanyak 451 KK pada tahun 2017. Berarti ada sekitar 747 KK yang seharusnya juga berhak menerima bantuan tapi tidak terdaftar dalam penerima bantuan. Seperti halnya data terakhir penulis temukan di lapangan dalam daftar nama penerima BPNT APBD tahun 2018 hanya sebanyak 65 KK yang diusulkan. Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu penyebab kecemburuan sosial ditengah masyarakat adalah tidak semua yang tergolong masyarakat kurang mampu menerima bantuan secara merata.

Demi mengetahui pokok persoalan mengenai jumlah penerima bantuan dan pendataan yang dilakukan di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, penulis mewawancarai ibu Purnawanti selaku Staf Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Beliau mengatakan :

“untuk sementara tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan program tersebut, karena data awal yang dimasukkan pertama kali dari pengalihan raskin dan rastra untuk tahun 2017. Hal ini mengingat adanya pembatasan kuota penerima bantuan yang diusulkan dengan yang mendapat bantuan. Sedangkan untuk tahun 2018 kami sudah mengirim beberapa nama untuk diusulkan sebagai data tambahan penerima bantuan dalam APBD 2018. Disamping itu pihak lurah sudah membagikan formulir kepada setiap masyarakat dengan bantuan RT dan RW setempat untuk mendata kembali warga yang tergolong kurang mampu dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dikirim untuk usulan penerima bantuan lainnya”.(wawancara 10 februari 2018)

Penjelasan dari staf pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kuranji dapat dipahami bahwa adanya pembatasan kuota penerima bantuan dengan data yang diusulkan. Kemudian, data yang diusulkan untuk penambahan penerima bantuan tidak sebanding dengan jumlah penerima sebelumnya. Mengingat tidak ada penambahan yang begitu banyak serta pergantian data penerima sebelum dengan penerima bantuan berikutnya mengakibatkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat seperti halnya pengakuan salah satu masyarakat ketika penulis wawancarai beberapa waktu lalu. Dengan adanya pembatasan kuota yang disampaikan oleh staf kelurahan banyak masyarakat tidak mengetahui keterbatasan kuota tersebut membuat sebagian masyarakat mengeluh dengan harapan agar bisa menjadi KPM.

Dalam penetapan Keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sudah dijelaskan juga pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-258-2017 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Per Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Disamping itu juga Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 132/Huk/2017 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bantuan

Sosial Pangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Serta Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 5/PFM/SK/HK.01/07/2017 Tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017.

Permasalahan lain yang penulis temukan dalam pengamatan selama Program Magang IAN FIS UNP selama bulan Agustus adalah masyarakat tidak memahami penggunaan kartu Kombo yang dibagikan oleh bank penyalur, yaitu BRI. Sehingga masyarakat datang ke kantor lurah untuk menanyakan kegunaan lain dari kartu Kombo tersebut. Namun, masyarakat tidak menemukan jawaban yang jelas dari pihak kelurahan sendiri.

Dari hasil pengamatan peneliti diatas, terlihat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank BRI sebagai mitra kerja dari BPNT dalam penyerahan kartu Kombo kepada masyarakat penerima bantuan. Berdasarkan pedoman umum BPNT dijelaskan bahwa salah satu tugas bank penyalur adalah melakukan sosialisasi dan edukasi Kartu Kombo Program BPNT kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan, Pendamping BPNT, Camat, Perangkat desa/Kelurahan, *E-warong*, dan KPM.

Berdasarkan kondisi dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan Tim Kordinasi Bansos Pangan dan terutama oleh Pendamping BPNT
2. Pendistribusian bantuan yang tidak merata terhadap masyarakat tergolong kurang mampu
3. Tidak akuratnya pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh pihak kelurahan terhadap data yang ada dilapangan
4. Terbatasnya kuota penerima bantuan mengakibatkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat kurang mampu lainnya yang tidak mendapat bantuan
5. Masyarakat tidak mengerti mekanisme penggunaan kartu KitKombo sebagai alat tukar bantuan
6. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank BRI sebagai mitra kerja BPNT.

C. Batasan Masalah

Untuk memberi arahan terhadap masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan Tim Kordinasi Bansos Pangan dan terutama oleh Pendamping BPNT
2. Pendistribusian bantuan yang tidak merata terhadap masyarakat tergolong kurang mampu
3. Tidak akuratnya pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh pihak kelurahan terhadap data yang ada dilapangan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah pada penelitian in sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang
3. Mengidentifikasi solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

F. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan permasalahan-permasalahan yang dibahas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara, Khususnya kajian tentang Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Bagi Instansi Terkait, Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau program kerja dalam pengembangan pemerintahan daerah terkhusus bagi mahasiswa dalam bidang Administrasi Negara.

2. Bagi peneliti sendiri, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik terhadap Jurusan IAN FIS UNP.